

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cohen, Moris L. dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research*, West Publishing Co., Minnesota.
- E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Faiz, Elsa, *et al.*, 2013, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Bogor.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar, Dossy dan Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Genta, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, *et al.*, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kawo, Yosef Riwu, 1982, *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Djohansjah J., 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.

- Komisi Yudisial, 2010, *Cetak Biru Pembaruan komisi Yudisial 2010-2025*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Risalah Sidang Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muqoddas, Busyro, 2009, *Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Buletin Komisi Yudisial, Jakarta
- _____, 2010, *Laporan Pertanggungjawaban Komisi Yudisial Periode 2005-2010*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Namirazswara, Ingrid dan Zara Zesty, 2015, *Kiprah 10 Tahun Menjaga Etik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT CitraAditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P., 1985, *Filsafat Administrasi*, CV Gunung Agung, Jakarta.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan Bersih dan Berwibawa*, Citra Aditya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujanto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumadhija, Ardhan, *et al.*, 2010, *Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 1989, *Etika Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1993, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Thohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Usfunan, Yohanes, 2006, *Komisi Yudisial: Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Wirianata, I Gede A.B., 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waliyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.
- Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 129/KMA/SKB/IV/2009 & 04/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

HASIL PENELITIAN / TUGAS AKHIR

Rahmawan, Triya Indra, 2012, “Politik Hukum Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim di Indonesia”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sahputra, Riyo Eka, 2014, “Implikasi Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim terhadap Sistem Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung”, *Penulisan Hukum* Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Yustisia, Ayu, 2011, “*Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 16 Desember 2006.

INTERNET

Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Hakim juga Manusia, <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/446-hakim-juga-manusia>, diakses pada tanggal 24 November 2017.